

44 SMP Kota Bogor Lakukan PTM Mulai 4 Oktober

BOGOR (IM) - Sebanyak 44 dari 127 sekolah tingkat sekolah menengah (SMP) di Kota Bogor akan melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai 4 Oktober 2021.

Kadisdik Kota Bogor, Hanafi menuturkan, 44 sekolah itu telah melewati verifikasi dari sekitar 50 sekolah yang mengusulkan PTM. Indikator verifikasi, mulai dari kesiapan orang tua, fasilitas penunjang proses, hingga adanya satgas internal sekolah.

"Kita terus sekolah-sekolah yang belum terverifikasi untuk melakukan penyempurnaan, selagi PTM berjalan kita terus melakukan verifikasi faktual sekolah-sekolah," kata Hanafi, saat meninjau simulasi PTM di SMPN 5 Kota Bogor, Selasa (28/9).

Hal itu juga beriringan dengan sekolah tingkat atas (SMA/SMK) yang kewenangannya di tingkat provinsi, juga sekolah madrasah di Kementerian Agama.

"Kita maunya serentak pada 4 Oktober nanti. Kita masih koordinasi dengan Pemprov Jabar dan KCD Kemenag Sementara, untuk SD belum dilakukan pada Oktober," paparnya.

Hanafi pun memastikan, sanksi penutupan sekolah akan dilakukan bila ada siswa yang terpapar Covid-19. Sanksi penutupan hanya dilakukan di sekolah yang terindikasi siswanya positif saja.

"Makanya kita ingin simulasi itu, memastikan aturan dan alur PTM dapat terlaksana dengan baik dan tanpa kendala," tambahnya. ● **gio**

Pemkab Bogor Gelar WIG

CIBINONG (IM) - Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab) akan menyelenggarakan acara Bogor Innovation Wildly Important Goals (WIG) tahun 2021, di Hotel Pullman Ciawi secara hybrid, Rabu (29/9).

Acara akan dibuka oleh Bupati Bogor, Ade Yasin, dan diisi nara sumber pada sesi talkshow yakni Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, A Fatoni dan Rektor IPB University, Arif Satria.

Acara akan dihadiri secara langsung oleh Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Bogor, Perwakilan Kemendagri, jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor dan media massa.

Sementara secara virtual, acara akan diikuti Camat se-Kabupaten Bogor, penerima beasiswa MIR atau pendidikan lanjutan ASN, SKPD se-Kabupaten Bogor, RSUD se-Kabupaten Bogor, Puskesmas se-Kabupaten Bogor, SMK Negeri Giomas dan SMK Negeri 1 Cibinong melalui youtube channel Pemkab Bogor.

Pada acara tersebut akan dilakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) kerjasama beasiswa Pancakarsa dengan 17 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Bogor. Acara juga akan diisi pameran Gelar Inovasi Daerah dan inovasi kampus.

Ade Yasin mengungkapkan, pemerintah daerah saat ini dituntut meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah sesuai amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk mendorong dan membangun budaya inovasi di berbagai sektor melalui kebijakan one institution one innovation dan one village one innovation," ujar Ade Yasin.

Melalui acara Bogor Innovation WIG 2021, diharapkan dapat meningkatkan inovasi di segala bidang, baik di bidang tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik maupun inovasi bentuk lainnya di masyarakat. ● **gio**

8 | Nusantara



KECELAKAAN TRUK DI NAGREG

Kendaraan melintas di samping truk yang mengalami kecelakaan tunggal di Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (28/9). Kecelakaan truk bermuatan semen cair tersebut diduga karena gagalnya fungsi pengereman hingga mengakibatkan dua orang meninggal.

Pembentukan Provinsi Cirebon Raya, DPRD Jabar: Aspirasi Sah-sah Saja

Aspirasi dari masyarakat ya sah-sah saja ya, tapi kan untuk menuju ke pemekaran daerah yang fokus pada provinsi itu harus melalui berbagai tahap. Saat ini situasi kita sedang menghadapi pandemi, PAD Jabar turun sampai Rp 5 triliun. Jadi saya kira, itu dulu yang menjadi fokus DPRD Jabar, supaya ekonomi ini bisa tumbuh," ujar Anggota Komisi I DPRD Jabar, Abdy Yuhana.

BANDUNG (IM) - Sejumlah Anggota DPRD Jawa Barat bersuara terkait deklarasi

Provinsi Cirebon Raya oleh Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Cirebon Raya

(KP3C). Cirebon Raya meliputi wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan atau yang dikenal dengan sebutan Ciayumajakuning.

"Jadi pertama, aspirasi dari masyarakat itu ya sah-sah saja ya, nah tapi kan untuk menuju ke pemekaran daerah yang fokus pada provinsi itu harus melalui berbagai tahap. Saat ini situasi kita sedang menghadapi pandemi, PAD Jabar turun sampai dengan Rp 5 triliun. Jadi saya kira itu dulu yang menjadi fokus DPRD, supaya ekonomi ini bisa tumbuh," ujar Anggota Komisi I DPRD Jabar Abdy Yuhana saat dihubungi, Selasa (28/9).

Saat ini, proyeksi APBD Jabar terkoreksi hingga Rp 5 triliun, tepatnya dari sekitar Rp 44 triliun menjadi Rp 39 triliun. Pengesahan RAPBD 2021 pun masih terus didorong dalam sidang paripurna.

"Karena kan dengan tujuannya PAD berimplikasi pada program-program pembangunan yang menyentuh masyarakat termasuk di wilayah Cirebon Raya. Iya fokus menanggapi pandemi kita, masyarakat juga katakanlah belum beraktivitas penuh, jadi ya untuk saat ini belum ke arah sana tetapi sebagai aspirasi masyarakat ya wajar saja," ucap Abdy.

"Dulu pernah ada, sekarang muncul lagi. Terus kemudian waktu itu ada beberapa kabupaten yang kurang sependapat di wilayah itu," kata politisi dari PDI Perjuangan itu.

Senada dengan Abdy, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Daddy Rohanady mengatakan, dulu pernah ada P3C (Panitia Pembentukan Provinsi Cirebon) tetapi isu tersebut kembali redup.

"Saya kira perlu kajian matang, terkait dengan potensi-potensi artinya kan jangan sampai sebatas syahwat politik saja, di tingkat elite menduduki posisi tersebut, tapi buat masyarakat biasa? harus realistis

kalau membawa kemaslahatan lebih banyak kenapa tidak?," katanya.

Namun Daddy pun menilai aspirasi itu sah-sah saja diusulkan. "Saya kira harus ada penghitungan yang matang, jangan hanya memperimbangan emosional belaka," tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi sepakat membentuk Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Cirebon Raya (KP3C). Komite ini mendeklarasikan tengah memperjuangkan pembentukan calon daerah otonomi daerah (CODB) Provinsi Cirebon Raya.

Ketua Umum KP3C, Kurniawan Bahtiar mengatakan wilayah Cirebon Raya, dalam hal ini Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan atau yang dikenal dengan sebutan Ciayumajakuning sudah layak untuk mandiri dan menjadi DOB.

"Kalau ini merugikan, ya harus dibuktikan dengan kajian akademis. Kami membuktikan bahwa sudah layak mandiri. Potensi sumber daya alam dan manusianya sangat luar biasa," kata Kurniawan Bahtiar usai deklarasi di salah satu hotel di Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin (27/9). ● **pur**

Ade Yasin Terima Kunjungan Kanwil DJP Jawa Barat III



CIBINONG (IM) - Bupati Bogor, Ade Yasin menerima kunjungan Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Barat III, di Pendopo Bupati, Senin (27/9).

Kunjungan ini dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pusat juga sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Dalam kegiatan itu turut hadir, Kakanwil Muhammad Ismiransyah M Zain, Kabid Humas B Rachmat Prabowo, Kabid DP3 Sutan Siregar, Kabid PEP Harmirin, Kepala KPP Cileungsi Sugiri dan Kepala KPP Cibinong Tri Wibowo, serta yang mendampingi Bupati Bogor, Ade Yasin Sekretaris BPKAD.

Bupati Bogor, Ade Yasin dalam kesempatan itu menyatakan, sangat mendukung rencana KPP yang akan mengadakan bantuan teknis terkait pengisian SPT tahunan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten

Bogor dan terhadap 416 desa yg tersebar di wilayah Kabupaten Bogor.

Ia juga mendukung pemberian izin kepada para pengusaha yang akan mendirikan usahanya di wilayah Kabupaten Bogor agar mendaftarkan NPWP-nya di Kantor Pajak wilayah Kabupaten Bogor, sehingga potensi perpajakannya dapat diserap dan dinikmati oleh Kabupaten Bogor.

Menurutnya, kegiatan akan ditindaklanjuti dengan cara bimbingan teknis di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerjasama dengan unit vertikal Kanwil DJP Jawa Barat III yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

"Kita akan sosialisasikan dengan seluruh Kades dan 40 Kecamatan melalui zoom meeting. Biasanya kalau koordinasi melalui zoom meeting, staf sekalian hadir dengan camat dan kadesnya.

Akan kami koordinasikan dengan BPKAD supaya kegiatan ini bisa dilaksanakan," tandas Bupati Bogor. ● **gio**



OJEK MAKANAN BALITA DI BANDUNG
Sejumlah relawan Ojek Makanan Balita (Omaba) bersiap untuk mengantar makanan kepada balita di Cisaranten Kidul, Bandung, Jawa Barat, Selasa (28/9). Program Omaba yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Bandung tersebut bertujuan untuk memberikan makanan bergizi secara gratis kepada balita dari keluarga kurang mampu guna mencegah stunting.

SEBUT GAGE DI PUNCAK NGGAK NGEFEK

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Tawarkan Solusi Ini

PUNCAK (IM) - Kebijakan pemberlakuan sistem ganjil genap (Gage) kendaraan menuju Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor dianggap bukan solusi Mengurai kemacetan lalu lintas di wilayah pariwisata tersebut.

"Saat ini, sudah 3 pekan dilakukan uji coba pemberlakuan sistem Gage, namun saya melihat masih terjadi kemacetan hingga kebijakan tersebut saya anggap bukanlah solusi," ungkap Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman, kepada wartawan, Selasa (28/9).

Politisi PPP ini menuturkan, permasalahan sebenarnya Kawasan Puncak ialah sempitnya jalan, baik itu Jalan Raya Puncak, maupun jalan alternatif utara maupun jalan alternatif selatan.

"Jalan Raya Puncak, maupun jalan alternatif utara maupun jalan alternatif selatan itu lebarnya tidak sesuai dengan jumlah volumen kendaraan yang melaluinya, selain pelebaran jalan sebagai solusi jangka panjang, solusi jangka pendeknya yaitu larangan bus pariwisata masuk ke jalan-jalan tersebut, lalu angkutan kota atau odong-odong menjadi 'feeder' wisatawan dari area parkir ke objek-objek wisata hingga selain mengurai kemacetan,

kebijakan tersebut juga tidak 'mematikan' usaha masyarakat," tuturnya.

Usep menambahkan, selain hal di atas, solusi lainnya yaitu dibangunkan jalan layang dari Jalan Raya Puncak ke arah objek wisata atau jalan alternatif utara dan jalan alternatif selatan.

"Di Kawasan Puncak banyak perempatan atau persimpangan, untuk titik yang dilalui kendaraan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR) bisa membangun jalan layang. Kenapa itu tugas KemenPU-PR, karena Jalan Raya Puncak itu statusnya jalan nasional atau menjadi tanggung jawab mereka," tambah Usep.

Pria yang juga seorang advokat ini optimis dengan usulan kebijakan di atas, Kawasan Puncak bisa kembali menjadi destinasi wisata nasional layaknya Bali, Yogyakarta, Lombok, Raja Ampat dan lainnya.

"Rencana pembangunan Jalan Puncak II itu tidak bakal membuat Kawasan Puncak jadi sepi pengunjung, tetapi karena terjadi pengurangan kemacetan lalu lintas maka bisa menjadi pendukung Kawasan Puncak kembali menjadi destinasi wisata nasional," jelasnya. ● **gio**

Warga Bojong Koneng Laporkan Penggusuran ke Komnas HAM

JAKARTA (IM) - Sejumlah pengacara koalisi warga Bojong Koneng meminta perlindungan kepada Komnas HAM atas tindakan penggusuran yang dilakukan PT Sentul City. Mereka menganggap penggusuran itu mencederai hak asasi masyarakat.

"Kami melaporkan dan meminta perlindungan dari Komnas HAM terkait hak asasi warga. Bahwa setiap warga punya hak atas tanah, properti, dan kesejahteraannya," ujar Alghiffari Aqsa, salah satu pengacara koalisi warga saat ditemui di kantor Komnas HAM, Selasa (28/9).

Alghiffari datang bersama sekitar 20 orang perwakilan warga Bojong Koneng yang terdampak penggusuran oleh Sentul City. Menurut Alghiffari, penggusuran oleh Sentul City berdampak pada sekitar 6 ribu warga di kawasan Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Tak hanya penggusuran, kedatangan mereka juga dalam rangka melaporkan adanya dugaan kekerasan yang dialami warga Bojong Koneng dan pengacara yang

mendampinginya.

Alghiffari bercerita, kekerasan berupa pemukulan itu terjadi sekitar sebulan lalu saat seorang pengacara dari koalisi sedang mendampingi warga yang tanahnya akan digusur. Ketika bernegosiasi dan menghalangi alat berat, warga dan pengacara tersebut justru dipukul.

Alghiffari dan perwakilan warga yang melapor ke Komnas HAM hari ini membawa bukti berupa foto dan video kekerasan itu. Sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, namun, kata Alghiffari, tidak ada kelanjutannya hingga hari ini.

Sebelumnya, PT Sentul City Tbk. telah menggusur beberapa hunian warga di sekitar rumahnya, Kampung Gunung Batu RT 02 RW 11 Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada awal bulan ini. PT Sentul City mengklaim kepemilikan atas tanah yang telah ditempati oleh warga selama puluhan tahun itu.

Alghiffari mengatakan pihaknya juga membawa sejumlah bukti berupa dokumen perihal dugaan perampasan

tanah oleh Sentul City. Mereka juga mempersoalkan munculnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang tiba-tiba muncul tanpa ada konsultasi ke warga.

"Tanpa dilihat siapa yang eksis ataupun mengelola lahan di sana. Kemudian ada upaya menggusur lahan tersebut, lahan yang sudah lama dimiliki warga," ucap Alghiffari. "Warga tidak hanya mengalami penggusuran, tapi juga upaya kriminalisasi dari pengembangan."

Kuasa Hukum PT. Sentul City Tbk, Faisal Farhan sebelumnya menyebut ada 105 pemilik bangunan yang disomasi karena menduduki lahan PT. Sentul City di Bojong Koneng dengan nomor sertifikat HGB 2411 dan 2412. Sebanyak 69 pemilik bangunan sudah mengakui lahan tersebut milik Sentul dan melakukan kerjasama sewa pakai.

Ada 23 pemilik bangunan yang minta tenggat pembongkaran dan 7 bangunan sudah rata. "Sisanya tinggal 6 yang masih mengklaim lahan dan melawan," ucap Farhan, Selasa (21/9). ● **pra**



PAMERAN SENI RUPA DI JAMBI

Pengunjung mengamati lukisan tanpa judul karya Sanusi yang dipajang dalam Pameran Seni Rupa Rekonstruksi 2 di Ruang Pameran Teater Arena Taman Budaya Jambi, Jambi, Selasa (28/9). Pameran yang digelar hingga 30 September 2021 itu menampilkan karya seni sepuluh perupa asal daerah itu.